

**LEGALITAS PENGUATAN DAN PERLUASAN KEWENANGAN DEWAN  
KOMISARIS OLEH PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA  
PENGELOLAAN ANAK PERUSAHAAN DAN AKIBAT HUKUMNYA -  
STUDI KASUS PADA PT Y, ANAK PERUSAHAAN BUMN PT X, TBK.**

**INTISARI**

Oleh :

Laila Fitriana<sup>1</sup> dan Sulistiowati<sup>2</sup>

Induk Perusahaan perlu melakukan pengelolaan anak perusahaan (*parenting*), agar efisiensi dan efektifitas bisnis perusahaan grup tercapai. PT X Tbk menggunakan skema *parenting strategic control*, dimana Induk Perusahaan ikut mengontrol performansi Anak Perusahaan melalui penempatan direksi dan karyawannya sebagai Dewan Komisaris dan Direksi di Anak Perusahaan, serta mengubah anggaran dasar untuk menguatkan dan memperluas peran Dewan Komisaris termasuk mewajibkan Direksi melaksanakan keputusan Dewan Komisaris. Tujuan penulis membuat tesis ini adalah untuk mengetahui legalitas atas penguatan dan perluasan peran Dewan Komisaris beserta akibat hukumnya baik bagi Direksi yang melaksanakan keputusan ataupun Dewan Komisaris yang membuat keputusan apabila hasil keputusan tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan terkait kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris untuk memperoleh data sekunder dan penelitian lapangan di PT X Tbk dan PT Y untuk memperoleh data primer.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu penguatan kewenangan Dewan Komisaris masih sesuai dengan UUPT namun perluasan kewenangan Dewan Komisaris yang terlibat dalam membuat keputusan untuk menentukan pengurusan dan pengelolaan Perseroan dan wajib dilaksanakan oleh Direksi tidak sesuai dengan UUPT yang menganut *two-tier system*, melanggar azas *fiduciary duty* Direksi dan tidak sesuai dengan prinsip *independency* GCG. Terkait dengan dampak keputusan tersebut, Direksi tetap bertanggung jawab atas tindakan Perseroan meskipun dibuat berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, tidak dapat melepaskan diri dan menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sebagai pihak pengambil keputusan juga turut bertanggung jawab atas dampak dari keputusan tersebut. Namun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian apabila dalam pengambilan keputusan dilandasi dengan itikad baik, tanpa kelalaian dan untuk kepentingan yang terbaik bagi Perseroan, sehingga memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip *business judgment rule*.

Kata kunci : Dewan Komisaris dan Direksi

---

<sup>1</sup> Law Faculty of Gadjah Mada University, Jakarta

<sup>2</sup> Law Faculty of Gadjah Mada University, Jakarta

**THE LEGALITY ON STRENGTHENING AND EXTENSION OF THE  
AUTHORITIES OF BOARD OF COMMISSIONERS BY THE  
SHAREHOLDERS IN FRAME OF SUBSIDIARY MANAGEMENT AND  
THE LEGAL RESULTS - CASE STUDY AT PT Y, THE SUBSIDIARY OF  
STATE-OWNED BUSINESS ENTERPRISE PT X, TBK**

**ABSTRACT**

By:

Laila Fitriana<sup>1</sup> and Sulistiowati<sup>2</sup>

Parent Company needs to make management on its subsidiary (parenting), in order that efficiency and effectiveness of group company's business can be reached. PT X Tbk uses the scheme of parenting strategic control, where the Parent Company participate to control the Subsidiary's performance through placing directors and its employee as member of the Board of Commissioners ("BoC") and Board of Directors ("BoD") in the Subsidiary, as well as amend its articles of association in order to strengthen and expand the role of the BoC including to obligate the BoD implementing the decisions of the BoC. The thesis is made to know the legality on the strengthening and extension of the BoC' role as well as its legal results both for the BoD that implements the decisions and the BoC that makes the decisions whether the decisions result any loss for the company.

The study approach used by the writer is empirical juridical using data collection technique through library research relating to the authorities of the BoD and the BoC in order to get secondary data and field research made in PT X Tbk and PT Y in order to get primary data.

From the result there is found that strengthening of authorities of the BoC is still appropriate with the Law on Limited Liability Company/*UUPT*, but extension of the authorities of the BoC involving in making decisions to determine the Company's management and organization that are obliged to be implemented by the BoD is not appropriate with *UUPT* which practices two-tier system, breaches the principles of the BoD' fiduciary duty and is not appropriate with the principle of GCG Independency. Relating to the impacts of the decision, the BoD shall be still responsible on the Company's action even though it is based on the decision of the BoC, it cannot be free and surrender the responsibility to the BoC. The BoC as the decision maker shall also be responsible on the impacts of the decision. Nevertheless, the BoD and the BoC may be free from the responsibility against the loss if the decision making is based on a good will, without any default and for the best interest for the company, accordingly it gets protection based on the principle of business judgment rule.

The keyword : The Board of Commissioners and the Board of Directors.

<sup>1</sup> Law Faculty of Gadjah Mada University, Jakarta

<sup>2</sup> Law Faculty of Gadjah Mada University, Jakarta